



Media cetak: Bangka Pos Babel Pos
 Babel News Radar Bangka
 Rakyat Pos Lainnya: _____

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

Thn:

2
0
1
7

Halaman:

Dewan Paripurna Istimewa LHP BPK2016

Pemprov Babel Dapat Opini WDP



BANGKAPOS/KRISYANIDAYATI

Auditor Utama V BPK RI, Bambang Pamungkas menyerahkan LHP PK TA 2016 kepada Ketua DPRD Babel, Didit rigusjaya, Kamis (20/7).



DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Paripurna Istimewa Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2016 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Babel, Kamis (20/7).

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya dihadiri Wakil Ketua I DPRD Babel Hendra Apolo, Wakil Ketua III DPRD Babel Dedy Yulianto, Anggota V BPK RI, Isma Yatun, Auditor Utama V, Bambang Pamungkas, Gubernur Babel, Erzaldi Rosman, Forkominda dan Anggota Dewan.

BPK menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2016 kepada Ketua DPRD Babel, yang kemudian diserahkan kepada Gubernur Babel. BPK memberikan Opini Wajar Dengan Peceualian (WDP) atas LKPD TA 2016.

Ada beberapa hal yang dikecualikan dalam opini BPK terkait LKPD Pemprov Babel di antaranya ialah persoalan aset yang tidak diketahui keberadaannya mencapai Rp 18,14 miliar. Selain itu akumulasi penyusutan dan aset tetap gedung dan bangunan, serta aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang belum dapat dinilai kewajarannya.

Anggota V BPK RI, Isma Yatun mengatakan tidak ada kerugian negara dalam LHP atas LKPD Pemprov Babel. Kendati demikian, menurutnya rekomendasi yang disampaikan BPK harus ditindaklanjuti.

"Tidak ada kerugian negara," katanya.

Ia berharap tahun mendatang, LKPD dapat disampaikan tepat waktu, selain itu hasilnya akan lebih baik.

"Saya berharap apa yang akan dilakukan gubernur akan memberikan hasil yang baik, sehingga tahun 2017 ini hasilnya lebih baik," ujarnya.

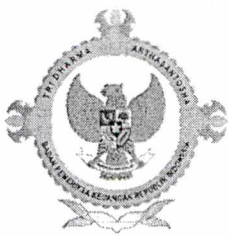
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya menilai laporan yang disampaikan BPK merupakan peringatan keras bagi Pemprov Babel untuk menertibkan dan menelusuri keberadaan aset.

"Laporan ini sebuah peringatan keras bagi pemprov Babel artinya kita butuh sinergi dan kerja keras agar tidak terulang. Jika ini terulang lagi, artinya sama saja kita tidak merespon temuan BPK," ujarnya.

Ia mengatakan dalam waktu dekat DPR akan melaksanakan pembahasan Panitia Kerja (Panja), dan pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan BPK Perwakilan Babel.

"Kedepan berharap fungsi pengawasan ini harus dijalankan untuk membantu keinginan Pak Gubernur untuk WTP, dan kita juga koordinasi dengan BPK untuk menindaklanjuti temuan ini," ujarnya.

Gubernur Babel, Erzaldi Rosman mengatakan



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Media cetak: Bangka Pos Babel Pos
 Babel News Radar Bangka
 Rakyat Pos Lainnya: _____

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
				✓											

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
✓					

Thn:

2
0
1
7

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
								✓															



pihaknya akan berupaya keras untuk menelusuri keberadaan aset senilai Rp 18,14 miliar. Bahkan dirinya berencana akan membentuk tim investigasi.

"Insya Allah tahun ini kita perbaiki, ada beberapa yang memang bisa kita lakukan cepat akan kita lakukan un-

tuk menelusuri keberadaan aset," katanya.

Ia menargetkan satu bulan mendatang hal rekomendasi dari BPK sudah dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti.

"Harapan kita satu atau dua bulan kita sudah selesai melakukan penelusuran aset sesuai rekomendasi BPK,"

katanya.

Usai Rapat Paripurna Istimewa LHP BPK, dilanjutkan dengan rapat paripurna penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016. (adv/o2/may/budi setyo pranata humas DPRD Babel)